

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Mulai Tahun 2020, Menunggak Pajak Kendaraan di Jateng Akan Berurusan dengan Pak Bhabin

<https://jateng.tribunnews.com/2020/03/02/mulai-tahun-2020-menunggak-pajak-kendaraan-di-jateng-akan-berurusan-dengan-pak-bhabin?page=all>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah (Jateng) siapkan sejumlah terobosan untuk meningkatkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2020 ini.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol Subandrya menuturkan, siap memaksimalkan peran Bhabinkamtibnas di setiap kelurahan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari PKB.

Nantinya, para Bhabinkamtibnas yang tersebar di wilayah Polda Jateng akan bergerak mengajak para wajib pajak membayar iuran maupun tunggaknya.

Mereka akan bertugas dari pintu ke pintu sehingga mendekati dengan para wajib pajak. Namun, keberadaan Bhabinkamtibnas bukan berfungsi sebagai penagih, melainkan pembimbing.

Menurutnya, langkah itu diambil mengingat tunggakan PKB di Jateng hingga Februari 2020 terbilang cukup tinggi.

Dari data yang dimiliki Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Subandrya menyebut, angka tunggaknya mencapai Rp 435 miliar.

Setidaknya, kata Subandrya, ada 1,5 juta unit kendaraan bermotor yang menunggak per Februari 2020.

Maka dari itu, pihaknya siap memberdayakan Bhabinkamtibnas supaya pelayanan kian dekat.

"Kami siap menggodok terobosan karena urusan kendaraan bermotor jadi tanggung jawab pihak polisi juga."

"Meskipun PKB diurus pihak Samsat, tapi dari kita (Ditlantas) pun harus membantu sebagai wujud sinergi," kata Kombes Pol Subandrya kepada Tribun Jateng, di Mapolda Jateng beberapa waktu lalu.

Dia menerangkan, nantinya tiap Bhabinkamtibnas memiliki catatan siapa saja para warga wajib pajak di daerahnya yang memiliki tunggakan PKB, termasuk biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Kemudian, tambah Subandrya, Bhabinkamtibnas pun bergerak mendorong masyarakat supaya mau mengurus kepemilikan kendaraan jika belum atas nama sendiri.

"Jadi, lintas sektoral meliputi Jasa Raharja, UPPD Samsat, dan Polisi harus rutin melakukan monitoring evaluasi (monev) tiap bulan supaya datanya sinergi."

"Jangan setahun sekali."

"Monev ini pun berguna bagi Bhabinkamtibnas agar mengantongi data," cetusnya.

Selain itu, pihaknya juga mulai menerapkan, Heregistrasi (daftar ulang) sistem penomoran kendaraan bermotor khusus roda empat dan lebih per 17 Februari 2020 lalu.

Penerapan heregistrasi, kata Dirlantas, dilakukan untuk penertiban sistem penomoran bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang sedang mengurus BBNKB maupun registrasi lima tahunan.

Dirlantas juga menambahkan untuk alokasi sistem penomoran pada heregistrasi sudah tertuang dalam ST Kapolda Jateng nomor: ST/441/II/YAN.3.5/2020 per tanggal 14 Februari 2020.

"Intinya, bagi kendaraan roda empat dan lebih akan mendapat nomer polisi baru jika sedang mengurus BBNKB dan registrasi 5 tahunan."

"Bagi kendaraan jenis sedan, minibus atau jeep akan mendapat nomer baru dari 1 sampai 1.999."

"Bus mendapat nomer dari 7.000 sampai 7.999."

"Sedangkan mobil barang dan khusus mendapat nomer dari 8.000 sampai 9.999."

"Ini berlaku di Jateng," pungkasnya. (gum)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH